

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian secara umum sistem pengendalian intern telah diterapkan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT walaupun penerapannya belum optimal. Namun masih terdapat temuan BPK dari audit Laporan Keuangan Tahun 2021 yang menunjukkan bahwa pengendalian intern Penatausahaan aset tetap masih lemah, berikut simpulan pada setiap unsur pengendalian intern:

1. Lingkungan pengendalian pada penatausahaan aset tetap di BPAD Provinsi NTT yang sudah sesuai, seperti dalam penatausahaan aset tetap tanah yang memiliki pengendalian internal seperti dalam adanya integritas dan nilai etika, struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
2. Dalam penilaian risiko, BPAD belum melaksanakan sesuai dengan aturan PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga BPAD sulit menangani apabila terjadi kesalahan.
3. Pengendalian khususnya kegiatan pengendalian dokumentasi yang baik, BPAD belum menerapkan unsur sistem tersebut, karena masih lemahnya SDM menyimpan dokumen-dokumen yang jadi penguat atas kepemilikan tanah, sehingga tanah pemerintah masih banyak yang belum bersertifikat. Syarat pensertifikatan harus bisa memenuhi kelengkapan dokumen yang diminta oleh BPN.

4. Informasi dan Komunikasi, pada BPAD sudah sesuai. dimana BPAD selalu memberikan informasi tentang rekap aset tetap tanah yang dimiliki oleh pemerintah kepada bagian akuntansi.
5. Pemantauan, sudah dilakukan dengan baik dimana BPAD telah melakukan pemantauan terhadap aset tetap tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam waktu 6 (enam) bulan dan 5 tahun sekali.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa BPAD Provinsi NTT yang termasuk Instansi Pemerintah, dalam melakukan penatausahaan aset tetap tanah belum sepenuhnya menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai.

## **6.2 Saran**

Dengan memperhatikan kesimpulan tersebut, maka terdapat beberapa saran yang dapat membantu BPAD Provinsi NTT agar bisa meningkatkan kedisiplinan kerja dalam rangka mencapai tujuan secara maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya, dilakukan analisis risiko dengan menerapkan kebijakan untuk memastikan berkurangnya risiko yang telah teridentifikasi pada penilaian risiko.
2. Perlu menjalankan penatausahaan aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan prosedur yang berlaku untuk mencegah terulangnya hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Dalam memberikan wewenang BPAD perlu lebih teliti dalam memilih pegawai dengan memberikan tugas dan tanggungjawabnya selama beberapa bulan, apakah kinerja pegawai tersebut baik atau tidak.
4. Dalam pengarsipan dokumen BPAD perlu melakukan pembagian berdasarkan klasifikasi dokumen-dokumen agar mempermudah dalam penyimpanan dan pencarian apabila dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sanusi. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Arens A. Alvin, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. 2015. *Auditing dan jasa assurance Pendekatan Terintegrasi*. Jilid 1. Edisi Lima Belas-Jakarta. Erlangga
- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2017. *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba 4: Jakarta
- Bastian, Indra. (2003). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2011. "*Sistem Akuntansi Sektor Publik*". Jakarta: Salemba Empat
- Bintang Santri Br, Panjaitan (2019) Pengendalian Intern atas Aset Tetap pada Kantor Pemerintah Pangulu Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas HKBP Nommensen. Diakses 16 April 2023  
<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3492>
- COSO. (2013). *Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary*, Durham, North California, May 2013
- Edison, Emron. Yohny anwar, Imas komariyah. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, T. Hani, 1986. *Manajemen*, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE
- Jenni Napitupulu (2018) Pengendalian Intern Aset Tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Medan. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas HKBP Nommensen. Diakses 18 April 2023  
<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1520>
- Kapoh, O.M., Ilat, V., & Warongan, J.D.L. (2017). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 213-223.  
<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17484.2017>
- Kurniawan, Topan. (2013) Analisis Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Kabupaten Musi

- Bayuasin. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang. Diakses 20 April 2023  
<http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1232/1/1>
- Lapod, B., Tinangon, J., & Wokas, H.R.N. (2019). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Air Permukaan serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*, 7(3), 2731-2740. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.23737>
- Madesen, Karamoy (2018) Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap BMD Pemerintah Kota Bitung. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi. Diakses 18 April 2023  
<https://doi.org/10.35800/jjs.v9i2.26470>
- Mahmudi. (2006a). Reformasi keuangan negara dan daerah di era otonomi. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, *Standar akuntansi pemerintahan telaah ktitis PP Nomor 24 Tahun 2005 (hlm. 23-39)*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Mahmudi (2010), Manajemen Kinerja Sektor Pu blik, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mulyadi. 2018. *“Sistem Akuntansi”*. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi, 2014. *Audit 1*, Edisi ke-6. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Mahiri, A. Eli. 2016. Pengaruh Pendelegasian Wewenang dan Komitmen Organisasi Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*. ISSN 2356-3923, Volume 3, No. 1.
- Putri Retno Amborowati (2022) Analisis Implementasi Pp Nomor 60 Tahun 2008 Pada Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap Di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (Bpkpad) Kabupaten Purworejo. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Diakses 3 April 2023  
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/40912>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *“Standar Akuntansi Pemerintah”*

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang “*Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah*”

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 “*Pengelolaan Barang Milik Daerah*”

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 Tentang “*Akuntansi Aset Tetap*”

Rangian, M.M., Nangoi, G.B., & Wokas, H.R.N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit di PT Bukopin Finance Graha Manado. *Jurnal Emba*, 9(1), 412-421. <https://doi.org/10.35794/emba.9.1.2021.32197>

SPAP. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta : Salemba Empat

Sinamo, Jansen H., 2010. “ Monitoring Sebagai Alat Kendali Kualitas SPIP”. *Warta Pengawasan: Membangun Good Governance Menuju Clean Government*, Vol. XVII/No. 2/Juni 2010. ISSN: 0854-0519, hal. 24.

Syamsir Torang. 2012. Metode Riset Struktur & Perilaku Organisasi. Bandung: Alfabeta

Wardah, Rangkuti (2017) “Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Intern Terhadap Aset Tetap Universitas Islam Negeri Sumatera Utara”

Warren Reeve Fess, 2006, Accounting, buku satu Edisi dua puluh satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Wibowo. 2015. Perilaku Dalam Organisasi. PT. Rajagrafindo Persada.

Zaki Baridwan, 2000. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta. Edisi 7. Penerbit BPFE